Jurnal
Al-Imam
Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies,
Al-Imam: Vol. 3 (2022), pp. 1-9

Pemikiran Neo-modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid

Donna Ramadhan Fitri[a,*], Abdullah A Afifi[b,c], Afifi Fauzi Abbas[a,c]

[a]*Pascasarjana Hukum Islam UIN Syech M. Djamil Djambek, Bukittinggi*
[b]*Graduate School of Business UKM, Selangor, Malaysia*
[c]*IDRIS Darulfunun Institute, Payakumbuh*

Date of publication: 20 Desember 2022

Abstract :
Neo-modernism emerged when the term post-modernism began when the term began to become a common discourse when many experts began to get displeased with the negative effects that modernity, either from the aspect of sociocultural structure or scientific aspects. Neo-modernism, if traced to its existence, is in the thoughts of Fazlur Rahman (1970). While in Indonesia itself has Neo-modernism figures namely Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid. As moralists and democrats, they have a complete, comprehensive, inclusive, and even free understanding of Islam. Therefore, their ideological and political actions often cause controversy. Even if they differ in practice, they have a paradigm of Islamic thought. Since Cak Nur put forward the jargon "Islam yes" and "Partai Islam no" in the 1970s, the integration of Islam and national opinion began to surface. Since then, the struggle for Islam through cultural channels has continued, and Muslims have also begun to participate in nation-building. In 1984, when NU under the leadership of Gus Dur approved Pancasila as the only precept, the relationship between Islam and the State grew stronger.

Keywords: *neo-modernism, cak nur, gus dur*

Abstraksi:
Neo-modernisme muncul saat istilah adanya post-modernisme, ketika term itu mulai menjadi wacana hal yang umum pada saat banyak pakar mulai gusar dengan efek negatif modernitas, baik dari aspek struktur sosial-budaya ataupun aspek keilmuan. Neo-modernisme ini jika dilacak keberadaanya yakni berada pada pemikiran Fazlur Rahman (1970). Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki tokoh Neo-modernisme yakni Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Sebagai moralis dan demokrat, mereka memiliki pemahaman Islam yang lengkap, komprehensif, inklusif, bahkan bebas. Oleh karena itu, tindakan ideologis dan politik mereka seringkali menimbulkan kontroversi. Kalaupun berbeda dalam praktiknya, sebenarnya mereka memiliki paradigma pemikiran Islam. Sejak Cak Nur mengemukakan jargon "Islam yes" dan "Partai Islam no" pada tahun 1970-an, integrasi Islam dan opini nasional mulai mengemuka. Sejak saat itu, perjuangan Islam melalui jalur budaya semakin berlangsung, dan umat Islam juga mulai berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

[*]Corresponding author: *ramadhandonna01@gmail.com*

Pada 1984, ketika NU di bawah kepemimpinan Gus Dur menyetujui Pancasila sebagai satu-satunya sila, hubungan Islam dan Negara semakin kuat.

Kata kunci: *neo-modernisme, cak nur, gus dur*

---

1. Pendahuluan

Membicarakan kasus jalinan agama serta negara merupakan suatu yang menarik, kenapa? Kita ketahui agama serta negara bagaikan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipertemukan, tapi saling melengkapi. Walaupun begitu agama pula yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial bernegara sebab agama ialah ruh untuk tiap warga ataupun orang yang menggerakkan hubungan antar warga yang lain. Dengan peranan itu menjadikan agama sangat mustahil untuk diabaikan begitu saja dari rutinitas aktifitas manusia.

Kebalikannya, negara perlu sangat memastikan terhadap pertumbuhan sesuatu agama di wilayahnya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan agama dan keagamaan sangat mempengaruhi terhadap terbangunnya masyarakat yang beradab (*civil society*). Apabila kebijakan negara di negara multi ras dan kultur cenderung berpihak kepada salah satu budaya ataupun agama tertentu, menjadikan kondisi negara tidak kondusif, bahkan mencuat konflik-konflik yang menuju kepada konfrontasi SARA (Bukhori, 2003).

Hubungan antara negara dan agama telah menjelma menjadi perdebatan yang melelahkan dan panjang tentang apakah negara harus terlibat dalam persoalan agama. Persoalan ini yang menjadi inti perdebatan mengenai sekularisasi. Relasi antara agama dan negara juga menunjukkan derajat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individu, yang perhatiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bebas dan otonom. Terlebih lagi saat ini dimana Islamisasi sudah mulai menghiasi berbagai sektor, menstimulus inovasi dalam praktek sosial hingga mengembangkan lembaga-lembaga otonom dalam pengawasannya (Afifi, Abbas, & Ismail, 2019).

Indonesia negara dengan populasi muslim yang dominan akan tetapi tidak meletakkan posisi sebagai negara Islam sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, yaitu konteks Indonesia yang memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam melihat kedudukan dan penggunaan negara dalam kehidupan masyarakat (Sjadzali, 1993). Pembahasan tentang komitmen negara terhadap agama tidak kalah penting karena dialektika ini merupakan indikasi bangsa yang akarnya terletak pada munculnya gerakan sekularisasi. Perdebatan ini juga mendapat perhatian kritis dalam konteks Indonesia, khususnya kemunculan negara-bangsa Indonesia oleh para pendiri negara (Maarif, 1998; Nasution, 1955).

Perwujudan tipe negara menjadi penting terkait dengan afiliasi negara dan agama di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk paling beragam di dunia. Selain itu, tingkat orisinalitas sentimen kedaerahan masyarakat Indonesia sangat tinggi, terutama dalam hal agama. Keberagaman agama juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara terbentuklah bentuk negara dan hubungan keagamaan para pendiri dengan bentuk negara menurut Pancasila (Wahid, 1989; Woodward, 1996).

Salah satu isu penting yang menimbulkan perdebatan dan kontroversi panjang, terutama pada masa berdirinya pemerintahan Orde Baru, adalah pencarian keadaan ideal relasi agama dan negara, terutama dalam kaitannya dengan pandangan hidup Pancasila. Masalah ini muncul karena berkembangnya anggapan di kalangan sebagian masyarakat bahwa kelompok muslim selalu memendam keinginan terpendam untuk mengadopsi Pancasila, pandangan hidup Islami. Secara historis, asumsi ini harus dipahami karena perbandingan tajam antara pendukung "Islam politik" dan nasionalis sekuler (Ibrahim & Malik, 1998; Tahir, 2012).

Maka dari itu seperti apa pemikiran Cak Nur dan Gus Dur khususnya mengenai hubungan agama dan negara dalam pemikiran Neo-modernisme? Tulisan ini bermaksud untuk menjawab permasalahan tersebut, akan tetapi sebelum menjawab permasalahan tersebut, diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep Neo-modernisme, biografi keduanya kemudian dilanjutkan dengan hubungan antara agama-negara dan neo-modernisme dalam hubungan agama-negara menurut Cak Nur dan Gus Dur.

1.1. Konsep Neo-modernisme

Modernisme baru (*neo-modernisme*) dalam kajian ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan post-modernisme. Namun, yang pertama jarang digunakan, sedangkan yang terakhir telah menjadi istilah utama untuk penelitian filosofis kontemporer. Oleh karena itu, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang post-modernisme.

Pengertian post-modernisme secara umum mengandung dua hal, pertama, post-modernisme dipandang sebagai keadaan historis setelah zaman modern, dan kedua, post-modernisme dipandang sebagai gerakan ideologis yang mengubah pemikiran pembangunan sebelumnya, dalam kerangka berpikir modern. Neo-modernisme menjadi identitas baru pada arus pemikiran Islam yang muncul sebagai sintesa antara tradisionalisme dan modernism (Asmuni, 1995; Iqbal, 2014).

Neo-modernisme pertama kali diperkenalkan di Pakistan oleh Fazlur Rahman dan kemudian dipindahkan ke Amerika Serikat. Pada tahun 1968, dia menerima tawaran dari Universitas California, dan kemudian pada tahun 1969, dia mengajar di Universitas Chicago dan diangkat sebagai profesor pemikiran Islam oleh Universitas Chicago.

Kebangkitan Islam adalah bagian dari jawaban dunia Islam untuk "*infertilitas*" yang terjadi di banyak belahan dunia Islam pada masa itu, tidak terlepas juga pada kawasan Nusantara (Acemoglu & Robinson, 2012; Afifi & Abbas, 2020; Al-Attas, 2011). Agama yang lahir dari wahyu Allah kepada Muhammad ini ditengarai tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini dipandang adanya kecenderungan agama hanya bertumpu pada teks normatif. Diperburuk pula pemahaman-pemahaman ahli-ahli agama yang kurang terhadap isu-isu dan konflik global yang menyebabkan terlambat dalam mengantisipasi permasalahan bersama-sama (Kuran, 1997). Hingga reformasi-reformasi dan pembaharuan mulai melaju ke tengah, menjadikan sebagian orang percaya bahwa Islam masih berjalan (Iqbal, 2014; Nasution, 1986; Syaukani, 1997).

Fenomena ini memicu respon dari semua pihak untuk mengomentari situasi tersebut. Salah satu isu utama yang diperhatikan oleh beberapa cendekiawan Muslim di abad ke-20 adalah bagaimana Islam menghadapi dunia secara rasional dengan tradisi agama, budaya, politik dan etika, modernisasi dan perubahan yang cepat terjadi (Nasution, 1991).

Wacana pemikiran Islam Indonesia modern mencatat Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai dua tokoh utama bagi berkembangnya sebuah gerakan pembaharuan yang dikenal dengan gerakan neo-modernisme Islam. Gerakan ini, yang pada mulanya diperkenalkan oleh Fazlur Rahman ketika ia berkunjung ke Indonesia di awal tahun 1970-an (Barton, 1997a; Rakhmat, 2001).

1.2. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 M di Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur. Kebetulan 1.358 Masehi dengan 26 Muharram. Dia lahir di keluarga petani. Ayahnya adalah KH Abdul Madjid, lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang yang didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdatul Ulama (NU), salah satu pendiri persatuan pesantren-pesantren di Jawa Timur. Cak Nur adalah keponakan dari aktivis Serikat Dagang Islam asal Kediri, Hajjah Fathonah Mardiyyah (Nadroh, 1999).

Nurcholis Madjid bersekolah SD SMP di Sekolah Rakyat Mojoangar dan sorenya mengaji di Madrasah al-Wathaniyah di Jombang. Cak Nur kemudian meneruskan di KMI Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur dan selesai pada tahun 1960. Cak Nur kemudian masuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1965 (Sastra Arab dan Kebudayaan Islam) dan lulus di tahun 1968, kemudian ia ditugaskan untuk kuliah di Universitas Chicago pada tahun 1978 (Ibrahim & Malik, 1998).

Nurcholish Madjid wafat pada 29 Agustus 2005, pada umur 66 tahun. Nurcholis Madjid berperan memberikan kontribusi bagi pemikiran Islam kontemporer, khususnya pada tahun 1990 yang disebutnya sebagai persiapan umat Islam Indonesia untuk era modern.

1.3. Biografi Abdurrahman Wahid

Gus Dur lahir pada tanggal 4 Sya'ban di Danyanyar, Jombang, pada tanggal 7 September 1940. Ia bersekolah SD di Matraman Perwari, Jakarta Pusat dan tamat tahun 1953. Kemudian pada tahun 1954-1956 Gus Dur melanjutkan sekolah SMEP di Yogyakarta dan tinggal di rumah Kiai Junaidi, kawan ayahnya yang juga anggota Majlis Tarjih Muhammadiyah. Gus Dur juga mengaji informal dengan KH Ali Maksum di Pesantren Munawwir Krapyak. Kemudian tahun 1957-1959, Gus Dur belajar di Pesantren Tegal Rejo Magelang dengan Kiai Khudori, salah satu tokoh NU. Selanjutnya tahun 1959-1963, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melanjutkan ke Pesantren Tambak Beras dengan Kiai Wahab Chasbullah di Jombang. Pada masa-masa ini (1950-an-1963) Gus Dur mengembangkan minatnya pada sastra Islam dan Arab klasik (Barton, 2003).

Pada tahun 1964, Gus Dur mendapat beasiswa Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo mengambil jurusan Syariah. Walaupun begitu, pembelajaran di Al-Azhar tidak terlalu ditekuni karena materi yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan di Pesantren dahulu. Di Kairo, Gus Dur menghabiskan waktunya di Perpustakaan Universitas Amerika Kairo yang terkenal dan modern pada saat itu (Barton, 2003), dan hanya ada sedikit mahasiswa dari Indonesia yang menjadi alumni universitas tersebut seperti Harun Nasution (mantan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Fauzi Abbas (Dekan Fakultas Adab dan Sastra Arab di Payakumbuh dan pimpinan Pesantren Darulfunun El-Abbasiyah) (Afifi & Abbas, 2020; Kasmiati, 2019).

Kemudian Gus Dur pindah dari Kairo ke Irak dan melanjutkan pendidikan formal di Fakultas Sastra Universitas Baghdad yang saat itu sudah modern hingga tahun 1971. Kembali dari Timur Tengah beliau menjadi dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang pada tahun 1972-1974. Gus Dur sempat menjadi sekretaris umum Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1975-1979 dan sudah mulai aktif dalam kepengurusan NU. Gus Dur pindah ke Jakarta pada tahun 1979 dan menjadi ketua Syuriah PBNU. Gus Dur juga menjadi tenaga pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian mengembangkan Pesantren di Ciganjur, Jakarta Selatan (Wahid, 1999).

2. Agama dan Negara

2.1. Agama dan Negara menurut Nurcholis Madjid

Menurut Cak Nur, relasi agama dan negara, khususnya negara Islam Indonesia, secara historis tidak diketahui. Peristiwa nabi Muhammad dimakamkan tiga hari setelah kematiannya, dikarenakan keributan dalam suksesi kepemimpinan. Karena model pewarisan kepemimpinan yang tidak jelas, menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, persoalan negara menurut Nurcholis Madjid bukanlah kewajiban, atau bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam. Adanya gagasan negara Islam tidak lebih dari kecenderungan untuk meminta maaf (Aziz, 1999; Madjid, 1987).

Dalam hal ini, tampaknya Cak Nur sangat terpesona dengan penjelasan bahwa Islam yang sejati bukan hanya hukum, susunan atau kombinasi hukum, tetapi juga formalisme negara dan pemerintahan. Tapi Islam adalah titisan tauhid, Tauhid adalah kekuatan spiritual yang dapat menghasilkan ke-*hanif*-an, toleransi, semangat demokrasi dan menghargai kemajemukan masyarakat (Madjid, 1992).

Oleh karena itu, konsep negara Islam mendistorsi hubungan yang mapan antara negara dan agama. Baginya, negara adalah kehidupan keduniaan bersifat rasional juga kolektif. Pada saat yang sama, agama juga memiliki dimensi spiritual dan personal. Agama dan negara susah untuk dipisahkan, akan tetapi keduanya harus tetap dibedakan dalam ukuran dan cara. Justru karena itulah Cak Nur menolak memandang Islam hanya sebatas ideologi, karena mengingkari dan merendahkan agama serta menjadikannya setara dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia (Madjid, 1983).

Agama Islam tidak mengharuskan negara atau pemerintahan harus berbentuk pemerintah Islam ataupun berbentuk negara Islam. Yang terpenting adalah esensi ataupun substansi, bukan sekedar hanya simbolisasi. Mendirikan bentuk negara merupakan hak dan kewajiban dalam bentuk berdemokrasi, walaupun Islam tidak mewajibkan membentuk negara Islam. Secara umum untuk berdirinya negara harus mampu mewujudkan beberapa prinsip untuk dapat mencapai tujuan adanya bernegara, yaitu: pemerintahan yang demokratis (musyawarah) dan adil, pemerintahan dinamis, dan pengakuan kedaulatan (Madjid, 1984).

Usai mengatakan bahwa ideologi nasional Pancasila sudah final, Cak Nur membahas kembali hakikat Islam serta ideologi dan jiwa bangsa Indonesia. Final adalah final disini, yang terkait dengan fungsinya sebagai tumpuan kehidupan berbangsa dan sosial Indonesia. Denda ini juga terkait dengan fungsi susunan kata dan susunan kata formal yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Denda ini sama dengan dakwah Islam di Tanah Air. Suasana sosial politik negara, ambil contoh Nabi SAW, beliau mendirikan negara Madinah (Budiman, 2019).

Ketika menuju proses kefinalan tadi, maka terjadilah polemik dan kontroversi yang begitu sangat tajam elit politik pemerintah maupun ditengah-tengah masyarakat, yang menjadi polemik didalam Pancasila yakni terdapat pada sila kesatu, "Ketuhanan yang Maha Esa". Cak Nur memahami sila kesatu Pancasila sebagai suatu titik temu antara penganut agama Islam dengan agama selain islam di Indonesia. Pengertian Cak Nur sendiri didasarkan pada Quran ayat 64 dari Surat "Ali-Imran" , yaitu: *"Katakan: "Orang-orang dalam kitab, di mana tidak ada perselisihan di antara kita, biarkan (tahan) satu kalimat (peraturan) bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, kita tidak mengasosiasikan Dia dengan apapun, dan Beberapa lainnya. Sebagai tuhan selain dari Allah". Jika mereka berbalik dan pergi, lalu katakan kepada mereka: "Lihat, kamilah yang berserah diri kepada (Allah)".*

Akan tetapi Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, dan tidak tetap. Bisa saja Pancasila di atur kembali atau di agamakan, itu adalah suatu hal bisa saja memungkinkan untuk terjadi. Untuk meraih berkemungkinan Pancasila diagamakan atau sering dikatakan Islamisasi Pancasila, harus ditunjang oleh para elite politik Islam maupun semangat Partai Islam tersebut (Budiman, 2019).

2.2. Agama dan Negara menurut Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid meyakini bahwa membahas masalah agama sangat erat dan berkait dengan masalah budaya (Woodward, 1996). Agama adalah doktrin (ajaran) yang memiliki sumber dari wahyu serta memiliki norma (aturan) yang bersifat normative. Agama itu sendiri bersifat kekal sedangkan budaya bersifat artifisial, sehingga budaya cenderung berkembang sesuai kebutuhan (Wahid, 1989).

Agama dipandang sakral sedangkan budaya tidak sakral. Negara adalah salah satu hasil dari kebudayaan manusia yang berubah menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Agama akan selalu dan secara permanen menyampaikan doktrin sakral seperti perdamaian, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Agama menyampaikan nilai-nilai etis yang sangat luhur (Afifi, 2021).

Agama adalah hal yang membebaskan yang dikemukakan oleh Gus Dur. Langkah ini bertujuan untuk mengkaji kembali agama (Islam) dari perspektif historis, yang lahir dari ketidakadilan dalam masyarakat komersial Arab. Menurut Gus Dur, setiap agama memiliki keunikan (*unicum*) masing-masing di awal kelahirannya. Pada dasarnya harus dipengaruhi oleh masalah-masalah universal. Untuk mewujudkan nilai-nilai universal tersebut, Agama harus merumuskan kembali pandangannya tentang harkat kemanusiaan, persamaan di atas. hukum, dan kebenaran, Persatuan antar manusia.

Dari perspektif pemahaman agama, dan menuju Islam yang berkarakter membebaskan, Gus Dur mengemukakan bahwa nilai-nilai dasar yang membedakan ajaran Islam adanya nilai-nilai untuk membentuk kehidupan bermasyarakat, yaitu keadilan, demokrasi syura, dan persamaan hak. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ini didasarkan pada aturan berikut :"Kekuatan berpikir rakyat bergantung pada kepentingan dan kesejahteraan mereka." Oleh karena itu, hukum harus dapat menjunjung tinggi pada nilai-nilai persamaan, pada keadilan

sosial serta demokrasi. Nilai-nilai dan prinsip tersebut perlu menjadi dasar bagi semua bentuk kelembagaan dan produk hukum (Wahid, 1989).

Gus Dur mengamati keterkaitan Islam dan Pancasila di bidang sosial dan politik, terutama dari keterkaitan fungsional dan simbiosis antara keduanya. Bagi Gus Dur, agama maupun pancasila tidak dapat diperbandingkan secara bulat utuh, karena perbedaan fungsinya masing-masing. Pancasila dapat menjadi tumpuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ia mengedepankan cita-cita agama dan mendukung kedudukannya secara fungsional. Pada saat yang sama, agama adalah fondasi kepercayaan masyarakat dan menjadi faktor pendorong yang dinamis.

Gus Dur memberikan pendapat Negara Indonesia akan bubar jika tidak ada Pancasila. Pancasila adalah seperangkat prinsip yang patut dipertahankan. Pancasila adalah gagasan konsep negara yang harus dimiliki dan perjuangkan. Secara informal, namun dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yang harus dipegang teguh adalah nilai-nilai Islam yang menjadi akar moral umat Islam (Wahid, 1999).

3. Neo-modernisme dalam hubungan Agama dan Negara menurut Nurcholis Madjid

3.1. Sekularisasi

Pertama-tama, perlu ditekankan bahwa Cak Nur memiliki perbedaan besar antara memahami sekularisasi dan sekularisme. Sekularisme adalah sistem ideologi tertutup dan terpisah yang berlepas dari agama. Pokok ajaran inti dari sekularisme adalah menyangkal kehidupan apapun selain kehidupan sekuler ini. Dari perspektif Islam, sekularisme adalah perwujudan modern dari pemahaman yang ditunjukkan Quran dalam surat Al-Jatsiyah ayat 24 yang sebagian manusia hanya berbicara mengenai hal yang duniawi saja.

Jelas sekularisme menurut Nurcholis Madjid tidak sejalan dengan agama, khususnya Islam (Madjid, 1987). Cak Nur menyatakan bahwa alih-alih memperlakukan Islam sebagai agama, ia justru mendepolitisasi Islam. Dia menolak mempolitisasi Islam untuk kepentingan kelompok ideologis dan politik anggota partai Islam. Sepanjang tahun 1970-an, ia dan timnya telah memperjuangkan gerakan anti-partai Islam. Moto yang terkenal saat itu adalah: "*Islam Yes, Partai Islam no*!" Menurut beliau, kekuatan politik Islam tidak selalu identik dengan partai Islam, apalagi ketika institusi politik tersebut diganggu oleh korupsi, nepotisme, dan konflik antar elit partai. Ia dengan tegas menolak Indonesia sebagai Negara Islam, karena Negara Pancasila sesuai dengan prinsip etika politik Islam.

Di awal tahun 1970-an, sekularisasi Islam Cak Nur mengejutkan banyak partai politik. Karena sebelum ide ini dilontarkan, Cak Nur adalah cendekiawan muda muslim pewaris tradisi intelektual Natsir. Karena itulah Cak Nur dijuluki "Natsir Muda". Oleh karena itu, ada banyak harapan bahwa dia akan menjadi seorang *stand-in* dan memainkan peran sejarah seperti Masyumi. Seperti Nasir dalam pemikirannya, harapan itupun bukanlah angan-angan (harapan kosong). Karena ia memiliki pemahaman yang baik tentang pemikiran intelektual Islam (klasik) dan modern (filsafat barat), maka pemikirannya pun luas. Karenanya, Cak Nur, seperti halnya Natsir, adalah pemikir internasional yang mampu menyerap dua permata peradaban Islam dan Barat sekaligus. Luasnya pemikiran tersebut dimungkinkan karena Cak Nur dan Natsir sama-sama mahir berbahasa asing. Natsir berbicara bahasa Inggris, Prancis, Arab dan Latin, sementara Cak Nur berbicara bahasa Inggris, Prancis, dan Persia.

Beliau sendiri menyatakan bahwa konsep sekularisasi yang ia usulkan adalah konsep sosiologis, bukan konsep filosofis yang diyakini para pengkritiknya. Dalam konteks tafsir sosiologis, sekularisasi merupakan gerakan sosial yang bertujuan membubarkan dan membubarkan Islam, oleh karena itu hanya Allah yang sakral di dunia ini. Di luar Tuhan bersifat sementara, dan sekuler (Suhelmi, 1999).

3.2. Pancasila ideologi terbuka

Jika Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka, maka bisa menjadi ideologi yang berkembang secara modern, oleh karena itu Pancasila tidak boleh dirumuskan kekal untuk selamanya (sekali dan untuk semua). Karena itu dapat membuat ideologi Pancasila menjadi

usang dan tidak dapat menyesuaikan dengan zaman (Gaus, 2010). Dengan dinamisasi perubahan yang terjadi pada Pancasila, masyarakat Indonesia terlihat sangat puas dengan pandangan yang menjelaskan relasi agama dengan negara, yang menganggap Pancasila adalah titik temu bagi semua golongan. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa kita yakin bahwa segala sesuatu perubahan ini sedang terjadi (Madjid, 1995).

4. Neo-modernisme dalam hubungan Agama dan Negara menurut Abdurrahman Wahid

4.1. Sekularisme

Sekularisme politik Gus Dur perlu disorot karena tokoh ini selain pemikirannya yang unik, juga politikus terkemuka pada zamannya. Gus Dur juga pemimpin puncak organisasi Nahdatul Ulama. Dibandingkan Cak Nur, Pemikiran Sekularisme Gus Dur jauh lebih radikal.

Menurut apa yang dibacakan Gus Dur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Ia dengan tegas menghendaki Indonesia menjadi Negara sekuler yang tidak didasarkan agama. Kalaupun Islam berperan hanya sebagai dasar-dasar pijakan moral kebidupan politik bangsa dan bersifat komplementer bagi Pancasila. Islam menjadi pelengkap Pancasila. Bagi tokoh puncak NU ini Negara Pancasila saat ini adalah bentuk final Negara Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Gus Dur menolak eksitensi ICMI dan menilainya sebagai kebangkitan kembali ‘politik aliran’ serta sekterianisme (*secretarianism*). Sektarianisme, dari segi apa pun menurut Gus Dur, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Untuk tidak sekretarian, setiap umat Islam menurut Gus Dur perlu bersikap inklusif, akomodatif terhadap pluralisme ideologis (Musa, 2013).

4.2. Pribumisasi Islam (Agama, Negara dan Budaya)

Mengenai Islam dan hubungannya dengan persoalan sosial budaya, menarik bahwa Gus Dur mengkritisi apa yang disebutnya fenomena "Arabisasi". Kecenderungan ini misalnya terlihat dari penamaan kegiatan keagamaan dalam bahasa Arab, misalnya orang bangga mengungkapkan apa yang sudah mereka kenal dalam kata atau kalimat bahasa Arab. Gus Dur menyebut Fakultas Keputrian berfungsi sebagai kulliyatul bannat di UIN. Orang awam akan merasa tidak puas jika tidak menggunakan kata "ahad" daripada kata "minggu", dan seterusnya. Seolah-olah Anda tidak menggunakan kata-kata Arab ini, itu akan menjadi "non-Islam", atau sebagai akibatnya, Islam seseorang akan berkurang (Barton, 1997b; Wahid, 2006).

Pribumisasi Islam Gus Dur ini juga mematahkan wacana Geertz tentang Islam dan budaya Jawa yang seolah-olah tidak dapat disatukan. Woodward juga sejalan dengan Gus Dur bahwa Islam di Indonesia adalah satu varian evolusi praktek keagamaannya sendiri, yang senantiasa dapat berubah (Geertz & Basri, 1992; Wahid, 2001; Woodward, 1996).

4.3. Pancasila Liberalisme

Visi Pancasila adalah bahwa semua kompetisi dan persaingan harus dilakukan secara beradab, dalam suasana saling memberi dan menerima antara kedua sisi permainan, untuk memajukan, mengaktifkan atau bahkan mendorong kompetisi. Pemenang adalah yang mewakili kepentingan berbagai pihak yang terpilih melalui pengambilan keputusan secara damai. Dengan kata lain, persaingan dan kompetisi adalah bagian dari proses untuk mencapai konsensus dan tidak dapat dipisahkan darinya.

Jadi mengapa perlu mengukur penerimaan secara nasional terhadap visi demokrasi integral Pancasila? Kebutuhan ini nyata, untuk memperkuat visi Pancasila tentang budaya politik yang memang ingin kita kembangkan ke depan. Kita bisa menjadi pancasilais dan liberal pada saat yang sama. Kedua sudut pandang tersebut tidak harus bertentangan, meskipun keduanya dapat menghasilkan budaya politik yang tidak betul-betul serupa. Kesimpulan logisnya sendiri adalah bagaimana mematangkan keterkaitan antara konsep-konsep seperti pancasila dan liberalisme. Ketidaksesuaian dalam hal apapun tidak berarti konflik yang lengkap antara Pancasila dan konsep-konsep ini.

Jika tidak ada upaya untuk memposisikan hubungan ini, pada akhirnya kita akan menghadapi konsep-konsep seperti liberalisme Pancasila. Mengoreksi ekses-ekses Pancasila

yang dapat menghasilkan chauvinisme Pancasila. Eksklusivitas menjadi bahaya laten bagi keberlangsungan Pancasila yang dapat mengubahnya menjadi anti demokrasi dan otoriter (Wahid, 2006).

5. Kesimpulan

Pemikiran Neo-modernisme Cak Nur maupun Gus Dur tentang hubungan agama dan negara adalah pengembangan sintesa pemikiran tradisionalisme (negara Islam) dan modernisme (negara sekuler). Neo-modernisme adalah tipologi pemikiran Islam yang premis dasarnya adalah bahwa Islam harus diikutsertakan dalam perjuangan modernitas, tanpa harus meninggalkan tradisi lama yang baik dan mapan, dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik.

Cak Nur maupun Gus Dur menginginkan relasi agama dan negara berdasarkan pada Pancasila. Nurcholish Madjid memandang hubungan antara agama dengan negara mengacu kepada posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan menjadi titik temu bagi seluruh pihak. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid hubungan agama dan negara yaitu Pancasila dan liberalisme, kita bisa saja dapat pancasilais dan juga memiliki pandangan liberal. Pandangan-pandangan ini tidak patut dipertentangkan, karena keduanya tidak identik. Sehingga umat Islam berbicara Pancasila artinya mereka sedang berbicara tentang agamanya, dan begitu juga umat yang lain, dengan koridor persamaan etis dan kultur budaya, bukan peribadatan.

Konsensus yang paling realistis adalah adalah bagaimana mendudukkan relasi yang matang dan inklusif antara paham-paham lain seperti sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya dengan Pancasila. Hal ini bertujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Umat Islam sebagai populasi yang terbesar terfasilitasi kepentingannya, umat-umat lain dan juga semua suku bangsa secara umum terfasilitasi secara proporsional sehingga bisa terus mengembangkan diri dan hidup harmoni satu sama lain.

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. Profile Books.

Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *2*, 1–5.

Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2020). Periode Perkembangan Darulfunun El-Abbasiyah 1854-2020. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *1*, 1–12.

Afifi, A. A., Abbas, A., & Ismail, I. (2019). Future Challenge of Knowledge Transfer in Shariah Compliance Business Institutions. *International Colloquium on Research Innovations & Social Entrepreneurship (Ic-RISE) 2019*.

Al-Attas, S. M. N. A.-A. (2011). *Historical Fact And Fiction*. Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia.

Asmuni, Y. (1995). *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam (Dirasah Islamiah III)*. Raja Grafindo Persada.

Aziz, A. A. (1999). *Neo-modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Barton, G. (1997a). Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual "Ulama": The meeting of Islamic traditionalism and modernism in neo-modernist thought. *Studia Islamika*, *4*(1), 29–81. https://doi.org/10.15408/sdi.v4i1.786

Barton, G. (1997b). *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama - Negara*. Yogyakarta: LKiS.

Barton, G. (2003). *Biografi Gus Dur ; The Authorized Biography of KH. Abdurrahman Wahid*. LKiS.

Budiman, A. S. (2019). *Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Hubungan Islam, Politik, dan Negara (Pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru)*. IAIN Bukittinggi.

Bukhori, P. (2003). *Membebaskan Agama Dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Ali Abd Ar-Raziq*. Bantul: Pondok Sanusi.

Gaus, A. (2010). *Api Islam Nurcholis Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Geertz, C., & Basri, H. (1992). *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Ibrahim, I. S., & Malik, D. D. (1998). *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Iqbal, M. (2014). *Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Kasmiati, K. (2019). Pembaharuan Pendidikan Islam Harun Nasution (Kajian Filsafat Pendidikan). *Scolae: Journal of Pedagogy*, *2*(2), 266–271. https://doi.org/10.56488/scolae.v2i2.66

Kuran, T. (1997). Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft*, *153*(1), 41–71. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40752985

Maarif, A. S. (1998). *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Madjid, N. (1983). Cita-Cita Politik Kita. In B. Carillo & Dasrizal (Eds.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.

Madjid, N. (1984). Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia. *Prisma*.

Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan, dan KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.

Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Madjid, N. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Musa, A. M. (2013). *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.

Nadroh, S. (1999). *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution, H. (1955). *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, H. (1986). *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Paramadina.

Nasution, H. (1991). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.

Rakhmat, J. (2001). *Prof. Dr. Nurcholish Madjid : Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Suhelmi, A. (1999). *Soekarno versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati, Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.

Syaukani, A. (1997). *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*. Bandung: CV Psutaka Setia.

Tahir, M. (2012). Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, *15*(1), 37–53.

Wahid, A. (1989). Pribumisasi Islam. In *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.

Wahid, A. (1999). *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Wahid, A. (2001). *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.

Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Woodward, M. (Ed.). (1996). *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.